

## KOP BPKP ATAU APIP

---

Nomor : LAP..... 2022  
Lampiran :  
Perihal : Reviu Peningkatan Penggunaan Produk  
Dalam Negeri Pada Pemerintah Kota WXYZ

**Yth. Walikota WXYZ  
di WXYZ**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Kota WXYZ Triwulan III Tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Reviu dilakukan sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Reviu dilaksanakan mulai tanggal ..... Agustus 2022 sampai dengan ....September 2022, dengan uraian sebagai berikut:

### **A. Dasar Penugasan**

- a. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Jenderal KementerianDalam Negeri dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 119/2705/IJ dan PRJ-002/D3/4/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah;

- e. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi WXYZ Nomor ST-..... Tanggal ..... Agustus 2022.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Kota WXYZ Triwulan III Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memberikan hasil analisis atas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (*demand*) produk dalam negeri (PDN), mendorong penyediaan (*supply*) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (*market*) produk dalam negeri;
2. Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah;
3. Memberikan hasil analisis atas realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri;
4. Mengidentifikasi permasalahan pengutamakan produk dalam negeri; dan
5. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

Sasaran reviu adalah kebijakan dan implementasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri, serta realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah daerah

## **C. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab**

1. Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Kota WXYZ s.d. triwulan III tahun 2022
2. Ruang lingkup reviu meliputi:
  - a. Analisis kebijakan Pemerintah Kota WXYZ baik dari sisi *supply*, *demand*, dan *market* yang mendorong P3DN;
  - b. Analisis komitmen dan realisasi belanja Pemerintah Kota WXYZ yang dialokasikan untuk P3DN;
  - c. Analisis kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi P3DN.
  - d. Validasi perhitungan realisasi PDN dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)

Data komitmen dan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa (PBJ) yang direviu merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota WXYZ.

Ruang lingkup kegiatan tidak termasuk proses pengadaan barang/jasa serta pembayarannya.

3. BPKP/APIP bertanggung jawab pada hasil reviu berdasarkan data yang disampaikan oleh manajemen Pemerintah Kota WXYZ.

#### **D. Metodologi**

Metodologi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah

1. Pengumpulan dan pengolahan data;
2. Analisis data dan kebijakan;
3. Observasi;
4. Wawancara dan permintaan keterangan atas implementasi P3DN dalam PBJ daerah.

#### **E. Simpulan Reviu**

Nilai PBJ Pemerintah Provinsi/Kab/Kota..... yang telah diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) s.d. 31 Agustus 2022 sebanyak ... paket dengan nilai sebesar Rp.....

Dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai PBJ direncanakan menggunakan PDN sebanyak .... paket dengan nilai Rp.....atau.....% dari nilai PBJ RUP. Klarifikasi atas nilai rencana tersebut kepada pejabat pembuat komitmen menunjukkan bahwa nilai PBJ dengan PDN hanya senilai Rp.....(diisi hasil validasi/klarifikasi PPKom dalam SISWASP3DN) atau...% dari nilai PBJ RUP.

2. Nilai realisasi PBJ sebagai berikut:

Dalam bentuk komitmen kontrak/SPK/SPB/dokumen yang dipersamakan senilai Rp....(baik PDN maupun Non PDN) atau .....% dari RUP PBJ, dengan nilai PDN sebesar Rp..... atau hanya ....% dari RUP PBJ

Rendahnya nilai realisasi realisasi PBJ dan realisasi PDN PBJ disebabkan oleh:

(uraikan penyebab mengapa realisasi PBJ dan/atau PDN PBJ rendah (dibawah 50% dari rencana)).

### 3. Validasi atas nilai PDN dan TKDN.

Dari nilai realisasi PDN dalam bentuk komitmen kontrak/dokumen yang dipersamakan tersebut telah dilakukan uji petik atas validasi perhitungan nilai PDN dan TKDN, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai PDN validasi menunjukkan hanya (Nilai PDN hasil validasi : Nilai klaim Sampel PDN)....% realisasi PDN yang merupakan PDN.
- b. Nilai TKDN hasil validasi menunjukkan bahwa dari klaim PDN nilai TKDN yang bisa dihitung hanya (Nilai TKDN hasil validasi : Nilai Sampel klaim PDN) .... %.

Hal tersebut menunjukkan sampai dengan akhir Agustus 2022, program P3DN pada Provinsi/Kabupaten/Kota.....relatif (telah/belum) berjalan sebagaimana diharapkan, yaitu:

- a. Nilai realisasi PDN dalam bentuk kontrak/dokumen lain yang dipersamakan, (hanya mencapai..... %/telah mencapai 40%) dari rencana PBJ (RUP), dan
- b. Hasil validasi perhitungan PDN menunjukkan keakuratan perhitungan PDN .... % dari nilai yang disampel, dan keakuratan perhitungan TKDN hanya mencapai....% dari dari nilai klaim PDN yang disampel.

Dengan demikian, jika hasil uji petik tersebut diproyeksikan terhadap realisasi PDN sampai 31 Agustus 2022, maka nilai realisasi PDN adalah sebesar Rp..... (..%tingkat akurasi X asersi PDN) atau .....% dari nilai PBJ, sedangkan nilai TKDN sebesar Rp..... (% akurasi TKDN X asersi TKDN) atau .....% dari nilai PBJ.

## F. Uraian Hasil Reviu

### 1. Reviu Kebijakan P3DN

#### a. Institusionalisasi P3DN

Pemerintah Kota WXYZ telah memiliki atau menetapkan Tim P3DN Daerah dengan SK .... Nomor ..... tanggal ..... . Reviu atas struktur organisasi, tugas dan fungsi Tim P3DN tersebut sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Tim P3DN Provinsi/Kab/Kota... **telah/belum** sesuai dengan Pasal 74 PP Nomor 29 Tahun 2018

**Uraikan kesesuaian/ketidaksesuaiannya !!**

Contoh:

- Struktur organisasi Tim P3DN telah sesuai dengan pasal 74 PP Nomor 29 tahun 2018, yaitu terdiri dari unsur pemerintah daerah dan dunia usaha.
- Struktur organisasi Tim P3DN **belum** sesuai dengan pasal 74 PP Nomor 29 tahun 2018, karena hanya melibatkan unsur pemerintah daerah dalam keanggotaannya.

- 2) Tugas Tim P3DN berdasarkan SK (**telah/belum**) sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2018 dan angka 1 Lampiran SEB Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

PP Nomor 29 Tahun 2018:

- (**Telah/belum**) melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
- (**Telah/belum**) berfungsi dalam memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Angka 1 Lampiran SEB Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 terkait tugas tim P3DN, yaitu **telah/belum** ada penugasan terkait:

- (**Telah/belum**) memetakan produk dalam negeri yang berada di daerahnya
- (**Telah/belum**) berkoordinasi dengan Tim P3DN Pusat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim P3DN **telah/belum** memiliki rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**Simpulkan apakah Tim P3DN telah efektif menjalankan tugasnya baik dilihat dari aktivitas yang dilakukan, laporan kegiatan, dan lain-lain**

**Jika disimpulkan belum efektif menjalankan perankan sebutkan alasannya....**

b. Dukungan terhadap aspek *Demand*

Dukungan Pemerintah Kota WXYZ terhadap Aspek Demand, antara lain:

- 1) Pemerintah Kota WXYZ **telah/belum** memiliki kebijakan terkait keberpihakan/perlindungan/penggunaan produk lokal dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMKM yang tertuang dalam (sebutkan nama peraturan dan substansi singkat peraturan)

**Salah satu contoh jika menyimpulkan telah memiliki:**

Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor..... tanggal .... 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang berisi:

- Mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola masing masing OPD untuk produk UMKM/Koperasi serta sudah terinformasikan dalam SiRUP.
- Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang dan jasa kepada UMKM yang tergabung dalam Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh LKPP\_RI.
- DII (sebutkan)

**Jika tidak ada kebijakan yang mendukung P3DN atau UMK dan Koperasi sebutkan alasannya.**

- 2) Pemerintah daerah **telah/belum** menetapkan kebijakan PDN sebagai salah satu kriteria kinerja organisasi perangkat daerah.

Sebutkan nama regulasi/aturan yang menyebutkan P3DN sebagai salah satu kinerja OPD (jika ada).

Sebutkan penyebab P3DN belum menjadi salah satu kriteria kinerja organisasi perangkat daerah.

c. Dukungan terhadap aspek *Supply*

Pemerintah Kota WXYZ **telah/belum** memiliki kebijakan yang mendukung aspek *Supply* PDN, yaitu:

**Sebutkan** peraturan/regulasi/kebijakan/surat atau dokumen lain yang merupakan upaya memudahkan/memfasilitasi supply PDN

**Contoh :**

Pemerintah daerah melalui surat.... Nomor..... tanggal..... hal.....telah mengumumkan kebutuhan pengadaan barang/jasa berikut spesifikasinya kepada dunia usaha sehingga kalangan dunia usaha mengetahui kebutuhan barang/jasa pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui program..... telah memfasilitasi UMK dan Koperasi dalam pengembangan/pembuatan/sertifikasi produk..... yang merupakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah telah memberikan insentif..... dst

**Jika belum ada sebutkan alasannya....**

d. Dukungan terhadap aspek *Market*

Dukungan Pemerintah kota WXYZ terhadap aspek Market (**telah/belum**) dilaksanakan yaitu:

Contoh :

a) Pemerintah daerah (**telah/belum**) memiliki atau menetapkan pengelola e-katalog lokal sesuai SK ....tanggal ..... tentang .....

b) Pemerintah daerah (**telah/belum**) memiliki kebijakan terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam katalog lokal yang tertuang dalam Surat Edaran SK Nomor..... tanggal ..... tentang Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing. Surat edaran tersebut menegaskan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendorong pelaku usaha/UMK yang selama ini bekerjasama untuk bergabung ke dalam e-Katalog Lokal Kota WXYZ serta *Marketplace*/ PPMSE dalam toko daring Bela Pengadaan.

c. Pemerintah daerah (**telah/belum**) memiliki toko daring lokal... (sebutkan jika ada) yang memfasilitasi penjualan produk-produk lokal oleh UMK dan koperasi lokal

d. dll (sebutkan)

**Hambatan penyedia untuk masuk e\_katalog lokal:  
(jelaskan)**

## 2. Reviu Implementasi P3DN

a. Implementasi Kebijakan dan dukungan pemerintah daerah dalam P3DN.

### 1) Aspek Demand

a) Pemerintah Kota WXYZ **telah/belum** merencanakan untuk mengalokasikan proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40% untuk penggunaan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pemerintah Kota WXYZ berdasarkan **RUP/SISWASP3DN** telah merencanakan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp..... dengan jumlah paket sebanyak ..... paket. Dari nilai tersebut sebesar Rp..... atau .....% menggunakan Produk Dalam Negeri dan Rp..... atau .....% menggunakan produk UMK dan Koperasi.

Nilai Total PDN yang telah divalidasi/diklarifikasi PPKom sampai dengan saat reviu sebesar Rp.....00 atau .....% dari total nilai PDN dan .....% dari nilai Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kota WXYZ (**telah/belum**) berkomitmen terhadap penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan Koperasi.

b) Uji petik kepatuhan penggunaan PDN pada 17 dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa (5 kontrak konstruksi, 2 kontrak jasa/konsultasi, dan 10 kontrak pengadaan barang barang) berupa KAK, HPS dan rancangan kontrak, menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- Sebanyak ..... atau...% dokumen pengadaan barang dan jasa yang diuji petik (KAK, rancangan kontrak) **telah** mencantumkan kewajiban penggunaan PDN.
  - Sebanyak ..... atau...% dokumen pengadaan barang dan jasa yang diuji petik (KAK, rancangan kontrak) **belum** mencantumkan kewajiban penggunaan PDN .
  - Hal tersebut disebabkan.... (**jelaskan**).
- c) Uji petik atas kepatuhan penggunaan PDN atas tujuh belas **proses evaluasi dokumen pada saat evaluasi penawaran pengadaan barang dan jasa** sebagai berikut:
- Sebanyak ..... atau ...% dari tujuh belas proses evaluasi penawaran yang diuji petik, **telah** memperhitungkan kandungan PDN (persentase TKDN) dan persentase preferensi harga yang akan diberikan;
  - Sebanyak ..... atau ...% dari tujuh belas proses evaluasi penawaran yang diuji petik **belum** memperhitungkan persentase TKDN dan persentase preferensi harga yang akan diberikan;
- Penyebab evaluasi penawaran belum mempertimbangkan % TKDN dalam penentuan pemenang adalah.....
- d) Uji petik atas kepatuhan penggunaan PDN pada tujuh belas dokumen kontrak/perjanjian pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
- Sebanyak ..... atau ...% dari tujuh belas dokumen kontrak yang diuji petik **telah** mencantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan persentase TKDNnya.
  - Sebanyak ..... atau ...% dari dokumen kontrak yang diuji petik **belum** mencantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan persentase TKDNnya.
- Penyebab dokumen kontrak tidak mencantumkan kewajiban penggunaan PDN dan persentase TKDN... (**uraikan**).
- e) Terdapat produk dalam negeri yang memiliki TKDN 25% dan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen. Namun demikian atas barang tersebut dilakukan pengadaan Non PDN/impor.

Produk-produk tersebut berupa produk.....

Rincian pengadaan yang seharusnya menggunakan PDN karena ada barang wajib, adalah sebagai berikut (dapat dijadikan lampiran).

No	Jenis Brg Wajib	Nama Brg Wajib	% TKDN + BMP	Merk Barang Impor yang dibeli	Nilai
1.	Komputer/Laptop/Printer	AIO....	40%	Dell...	400juta
2.	Alat Kantor: AC, TV,				
3.	Alat Kesehatan				
4.	Alat berat/kendaraan				
5.	dst				

## 2) Aspek Supply

Produk-produk yang pada umumnya masih diimpor oleh pemerintah daerah berupa ... (uraikan jenis produk yang paling sering diimpor oleh Pemda/Non PDN.

Penyebab masih dilakukannya impor atas barang-barang tersebut antara lain: (uraikan alasan PPK dari hasil wawancara)

Pemda melalui Dinas Perindustrian/Perdagangan/Koperasi dan UKM telah/belum melakukan fasilitasi sertifikasi TKDN. Hal tersebut disebabkan..... (misal :belum ada kejelasan kewenangan prosedur sertifikasi untuk UMK/Koperasi).

Pemda melalui Dinas Perindustrian/Perdagangan/Koperasi dan UKM telah/belum melakukan fasilitasi peningkatan kualitas produk-produk lokal..... Fasilitasi tersebut dilakukan melalui kebijakan (sebutkan atau kegiatan... (sebutkan)

Hal tersebut disebabkan (uraikan jika belum)

### 3) Aspek Market

Sampai dengan 31 Agustus 2022, jumlah produk yang tayang pada katalog lokal sebanyak ...produk dari..... penyedia. Dari .... produk yang ditayangkan dalam katalog lokal, dinyatakan.... produk atau ....% merupakan produk dalam negeri.

Kebijakan Pemda mendorong katalog lokal

Untuk mendorong penyedia menayangkan produknya dalam katalog lokal, pemerintah daerah (telah/belum) memfasilitasi dengan cara sebagai berikut:

- a) Pemerintah ..... (belum/telah) menetapkan prosedur yang jelas dan sederhana untuk pendaftaran dan penayangan produk lokal dalam katalog lokal.
- b) Pemerintah daerah (belum/telah) memfasilitasi pendaftaran penayangan produk dalam katalog lokal dalam mall layanan publik
- c) dll uraikan

#### Analisis PDN dalam Katalog Lokal

Dari analisis atas produk dalam katalog lokal yang dinyatakan sebagai produk dalam negeri (PDN) terdapat setidaknya.... produk yang sebenarnya merupakan produk impor, namun diklaim sebagai produk dalam negeri (diimpor/diproduksi dari LN, hanya dikemas, dan biaya kirimnya yang PDN)

#### Realisasi pengadaan melalui e-katalog

Sampai dengan saat revidi berakhir, realisasi pembelian melalui e-katalog lokal senilai Rp..... atau ....% dari nilai seluruh realisasi PBJ.

Nilai pengadaan melalui e katalog atas PDN sebesar Rp....., sedangkan nilai transaksi melalui katalog lokal atas produk impor sebesar Rp.....

Sebanyak .... produk dalam E-katalog tidak terdapat transaksi pengadaan.

Penyebab realisasi PBJ melalui katalog lokal masih rendah adalah:

(Uraikan)

#### Analisis Kewajaran Harga Produk PDN dalam Katalog Lokal

Terdapat/tidak terdapat produk PDN yang jika dibandingkan dengan produk Non PDN memiliki harga yang tidak wajar (di atas 25%)  
Jika ada uraikan contohnya....

No	Produk	Spesifikasi	Merk Non PDN dan Harga	Merk PDN dan Harga	Perbedaan Harga
1.	Mesin Jahit	.....	..... Rp50 juta	..... Rp 80juta	Rp30 juta (60%)
	Dst				

#### b. Uji Validitas Perhitungan PDN dan TKDN

##### Hasil uji validitas perhitungan PDN

Hasil uji validitas secara uji petik atas 25% realisasi PDN dalam bentuk komitmen kontrak/dokumen lain yang dipersamakan menunjukkan bahwa validitas atas klaim PDN oleh pemerintah daerah sebesar ....., dengan uraian sebagai berikut.

No	Realisasi PBJ sd 31-08-22	Realisasi PBJ-PDN sd 31-08-02	Paket Disampel	Nilai PBJ-PDN Disampel	Nilai PDN atas PBJ PDN Disampel	Nilai PDN Sampel Tdk akurat	% Akurasi Thd Sampel	Estimasi PDN Valid atas seluruh PBJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6:5)	(9 = 8*3)
	800 M	500 M	25 Paket	125 M	50 M	75 M	40%	200 M

##### Hasil uji validitas perhitungan TKDN

Hasil uji validitas perhitungan TKDN secara uji petik atas....% klaim TKDN menunjukkan bahwa:

- Senilai Rp...atau...% dari klaim TKDN tidak dapat dihitung (*disclaimer*), karena bukti dan dokumen pendukung perhitungan TKDN tersebut tidak ada/tidak tersedia

- Senilai Rp..... atau....% klaim TKDN menunjukkan perhitungan yang tidak valid (tidak didukung sertifikat TKDN/perhitungan penyedia /Tim P3DN yang dapat diterima)
- Senilai Rp.... atau....% klaim TKDN menunjukkan perhitungan valid karena didukung dengan dokumen perhitungan TKDN yang dapat diterima (sertifikasi, keputusan Tim P3DN, lainnya dengan uraian sebagai berikut.

No	Realisasi PBJ-PDN	Paket Disampel	Nilai PBJ-PDN Disampel	Nilai TKDN	Nilai TKDN Valid	Nilai TKDN Tdk valid	Tidak Dapat Dihitung ( <i>Disclaimer</i> )
	500 M	25 Paket	125 M	125 M	25 M	50 M	50M

### c. Pengendalian Dan Pengawasan

Hasil Reviu Terhadap Aspek Pengendalian dan Pengawasan P3DN

- 1) PPK (telah/belum) melakukan reviu kinerja penyedia melalui Aplikasi SIKAP.
- 2) OPD teknis telah/belum melakukan monitoring dan reviu terhadap implementasi P3DN. Hal ini disebabkan belum adanya juknis reviu P3DN untuk masing-masing OPD terkait.
- 3) APIP Daerah belum melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN. Hal ini disebabkan P3DN merupakan hal yang baru sehingga belum masuk dalam PKPT. Namun demikian pemantauan/monitoring melauai aplikasi P3DN telah dilakukan.

## F. Praktik Baik dalam Mendorong P3DN

Uraikan kebijakan/tindakan pemerintah daerah yang merupakan praktik baik P3DN sehingga dapat ditularkan ke pemerintah daerah lainnya.

## G. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Uraikan hambatan dalam pelaksanaan reviu P3DN Kota WXYZ, antara lain:

- Hambatan penyedia masuk e-katalog lokal
- Hambatan lainnya jika ada

## H. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian

Uraikan hal-hal yang belum masuk dalam TRO di atas namun perlu disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Misal:

Terdapat 29 paket kegiatan seharusnya tidak masuk dalam SiRUP Pengadaan barang dan Jasa yaitu belanja honorarium dan gaji pegawai.

Rincian Paket belanja yang seharusnya tidak masuk dalam SiRUP tersaji pada lampiran 4.

#### **I. Saran Kebijakan dan implementasi P3DN dan UMK/Koperasi dalam PBJ Daerah**

Dari permasalahan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kota WXYZ kami rekomendasikan kepada Walikota WXYZ agar:

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

NIP .....

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Daerah Kota WXYZ.